

**PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE
PRO-KEMISKINAN**

**(Studi Kasus Di Gampong Jruek Balee, Kecamatan Indrapuri,
Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI

Disusun Oleh :

ISRA AULIA

NIM. 190801087

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

DARUSSALAM-BANDA ACEH

1445 H/2024 M

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

Nama : Isra Aulia
Nim : 190801087
Program Study : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Aceh Besar, 24 Oktober 2000
Alamat : Desa Jruék Balee, Indrapuri, Aceh Besar

Dengan Ini Menyatakan Bahwa Dalam Penulisan Skripsi Ini Saya :

1. Tidak Menggunakan Ide Orang Lain Tanpa Mampu Mengembangkan Dan Mempertanggungjawabkan.
2. Tidak Melakukan Plagiasi Terhadap Naskah Dan Karya Orang Lain
3. Tidak Menggunakan Karya Orang Lain Tanpa Menggunakan Sumber Asli Atau Tanpa Izin Pemilik Karya
4. Tidak Melakukan Manipulasi Dan Pemalsuan Data
5. Mengerjakan Sendiri Karya Ini Dan Mampu Mempertanggungjawabkan Karya Ini.

Bila Dikemudian Hari Ada Tuntutan Dari Pihak Lain Atas Karya Saya, Dan Telah Melakukan Pembuktian Dan Mampu Mempertanggungjawabkan Dan Teryatan Memang Ditemukan Bukti Bahwa Saya Telah Melanggar Pernyataan Ini, Maka Saya Siap Dikenakan Sangsi Sesuai Yang Berlaku Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Uin Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian Pernyataan Ini Saya Buat Dengan Sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 Mei 2024 M

Yang Menyatakan,




ISRA AULIA
NIM. 190801087

**PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE
PRO-KEMISKINAN
(Studi Kasus Di Gampong Jruek Balee, Kecamatan Indrapuri,
Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI

Di Ajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam
Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Politik

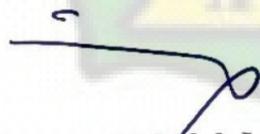
Oleh :

ISRA AULIA
NIM. 190801087

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik

Di Setujui Untuk Di Munaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I



Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.

NIP. 197810162008011011

Pembimbing II



Renaldi Safriansyah, S.E., M.HSc

NIP. 197901072023211003

**PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE
PRO-KEMISKINAN**
(Studi Kasus Di Gampong Jruek Balee, Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar)

SKRIPSI

Di Ajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam
Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Politik

Oleh :

ISRA AULIA
NIM. 190801087

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik

Di Setujui Untuk Di Munaqasyahkan Oleh :

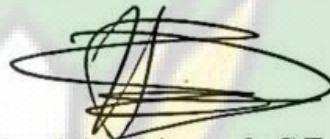
Ketua Sidang

Sekretaris,



Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.

NIP. 197810162008011011



Renaldi Safriansyah, S.E., M.HSc

NIP. 197901072023211003

Penguji I

Penguji II,



Dr. Sayed Amirulkamar, M.M., M.Si.

NIP. 19611005198202310007



Melly Masri, M.A.R.

NIP. 199305242020122016

**KEMENTERIAN POKOK DAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
Mengetahui
Besan

Dr. Muhibuludiah, S.Ag., M.Ag
NIP. 197403271999031005

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah – nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Tidak lupa pula penulis kirimkan shalawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Beserta keluarganya , parasahabatnya, dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman. Dalam kesempatan ini penulis mengambil judul **“Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pro-Kemiskinan Studi Kasus Di Gampong Jruek Balee Kabupaten Aceh Besar”** Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat – syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada program studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh .

Selama menyelesaikan skripsi ini, dari awal sampai tahap akhir penulis banyak mengalami hambatan ataupun kesukaran, penulis juga menyadari bahwa penelitian dan penyusunan proposal skripsi ini tidak akan terwujud jika tidak didasari dengan doa dan harapan kepada Allah SWT, selain itu juga proposal skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan doa dan bimbingan serta dukungan dari semua pihak. Dengan sepenuh hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan penghargaan yang tak terhingga kepada ibu Rizkika Lhena Darwin, M.A selaku ketua Prodi Ilmu Politik dan Bapak Ramzi Murzikin, M.A selaku sekretaris Prodi Ilmu Politik dan juga selaku pembimbing Akademik

yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan sekaligus member arahan kepada saya sehingga proposal skripsi ini dapat terselesaikan .

Ucapan terima kasih dan kasih sayang yang tak terhingga untuk kedua orang tua penulis Ayahanda Saiful Husen dan Ibunda Eva Susanti Beserta seluruh keluarga semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, yang tidak henti – hentinya memberikan semangat, motivasi, cinta, perhatian dan kasih sayang serta doa dan nasehatnya yang selalu di sampaikan setiap waktu .

Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati , penulis menerima kritikan atau saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dan untuk pengetahuan penulis di masa mendatang. Penulis berharap penyusunan proposal skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan pihak – pihak yang ingin membacanya.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis memohon doa semoga amal bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat pahala dari – Nya. Tiada kata yang paling indah untuk mengungkapkan semua ini, hanya satu kata Alhamdulillah Rabbal ‘Alamin.

Aceh Besar, 29 Mei 2024
Penulis,

ISRA AULIA

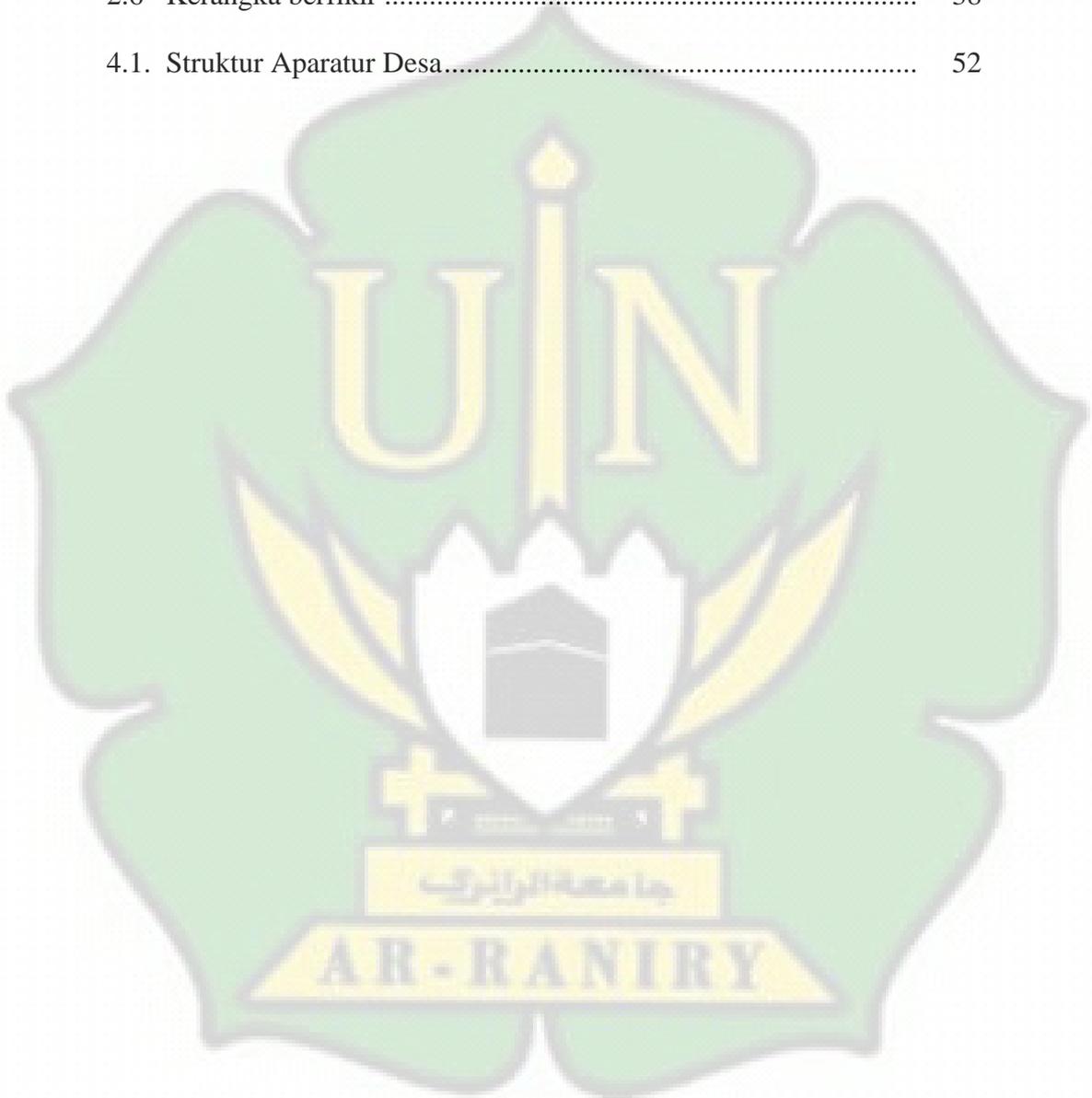
DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
SURAT KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SIDANG	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABTRAK.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang Permasalahan	1
1.2.Rumusan Masalah	7
1.3.Tujuan Penelitian	8
1.4.Manfaat Penelitian	8
1.5.Penjelasan Istilah.....	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	17
2.1.Penelitian Terdahulu	17
2.2.Program Pro-Kemiskinan.....	24
2.3.Konsep kemiskinan	30
2.4. Implementasi Good Governance.....	32
2.5.Pengertian Good Governance Menurut Para Ahli	38
2.6. Kerangka Berfikir	39
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1.Jenis Penelitian	40

3.2. Lokasi Penelitian	40
3.3. Fokus penelitian	40
3.4. Informan Penelitian	41
3.5. Sumber Data Penelitian	43
3.6. Teknik Pengumpulan Data	45
3.7. Teknik Analisis Data	47
3.8. Keabsahan Data	49
BAB IV PEMBAHASAN.....	50
4.1. Profil Gampong Jruék Balee	50
4.2. Prinsip Penerapan Good Governance	53
4.3. Tinjauan Penerapan Good Governance	59
4.4. Upaya Penerapan Good Governance	65
4.5. Analisa Penulis	69
BAB V KESIMPULAN	72
5.1. Kesimpulan	72
5.2. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
DAFTAR TABEL	
1.1 Tabel Kemiskinan Aceh	76
1.2 Tabel kemiskinan Aceh Besar	76
3.1. Informan penelitian	83
4.1 Tabel Kemiskinan Gampong Jruék Balee	90

DAFTAR GAMBAR

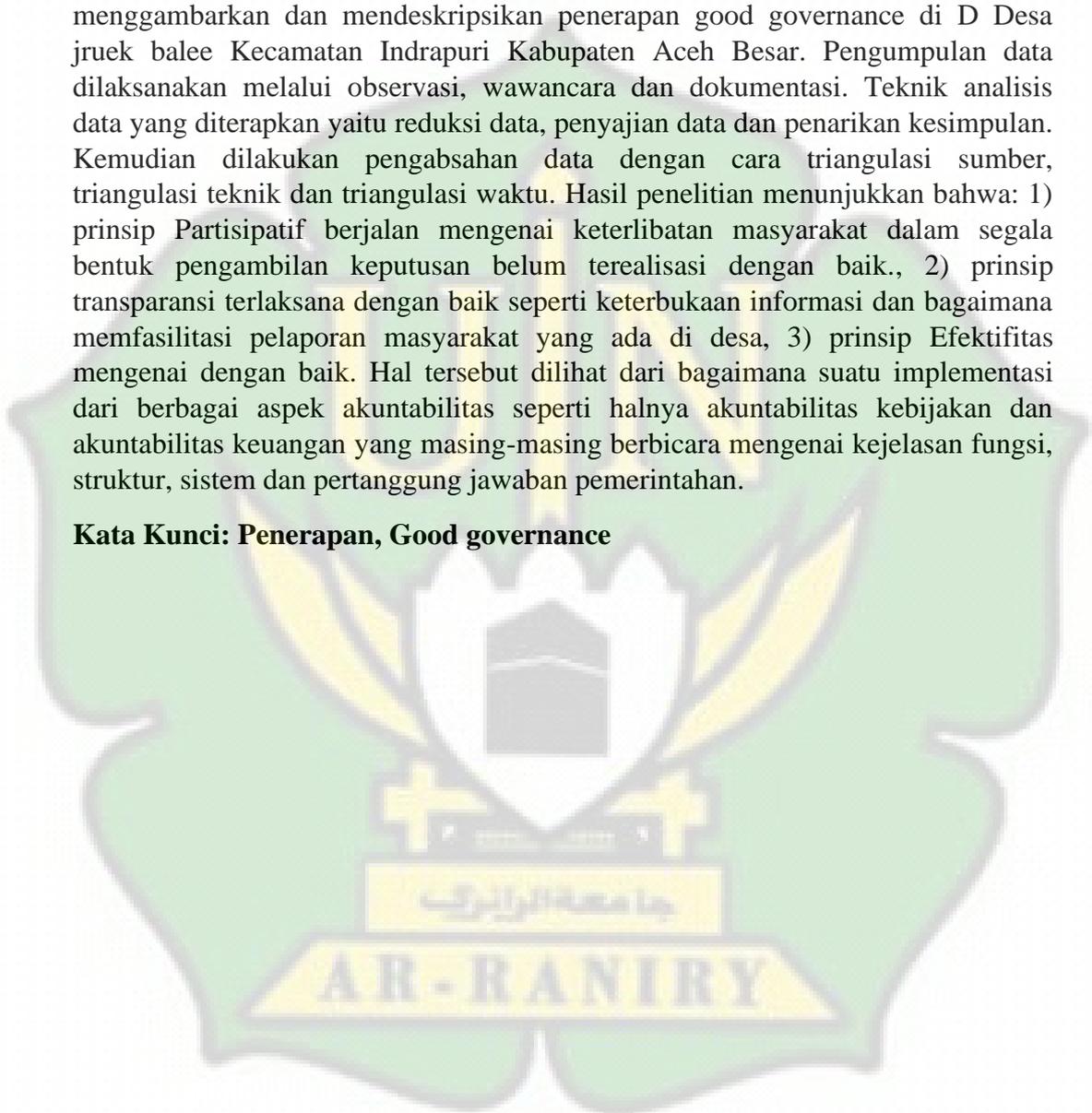
2.6 Kerangka berfikir	38
4.1. Struktur Aparatur Desa.....	52



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan good governance di Desa jruék balee Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif tipe deksriptif yaitu untuk menggambarkan dan mendeskripsikan penerapan good governance di D Desa jruék balee Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. Pengumpulan data dilaksanakan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang diterapkan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kemudian dilakukan pengabsahan data dengan cara triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) prinsip Partisipatif berjalan mengenai keterlibatan masyarakat dalam segala bentuk pengambilan keputusan belum terealisasi dengan baik., 2) prinsip transparansi terlaksana dengan baik seperti keterbukaan informasi dan bagaimana memfasilitasi pelaporan masyarakat yang ada di desa, 3) prinsip Efektifitas mengenai dengan baik. Hal tersebut dilihat dari bagaimana suatu implementasi dari berbagai aspek akuntabilitas seperti halnya akuntabilitas kebijakan dan akuntabilitas keuangan yang masing-masing berbicara mengenai kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggung jawaban pemerintahan.

Kata Kunci: Penerapan, Good governance



BAB I
PENDAHULUAN
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE
PRO-KEMISKINAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa pemerintahan Desa melibatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di dalam kerangka sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Perangkat gampong, sebagai elemen dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong, memiliki tugas kepala gampong yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat gampong. Wewenang gampong mencakup kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong, pelaksanaan pembangunan gampong, pembinaan kemasyarakatan gampong, dan pemberdayaan masyarakat gampong, yang didasarkan pada inisiatif masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat gampong.¹

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan pembangunan yang ditandai dengan pengangguran dan keterbelakangan serta keterpurukan. Masyarakat miskin lemah dalam kemampuan berusaha dan mempunyai akses yang terbatas kepada kegiatan sosial ekonomi. Permasalahan kemiskinan sangat kompleks dan

¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

upaya penanggulangannya harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu. Dengan demikian, kemiskinan menjadi salah satu tema utama pembangunan. Keberhasilan dan kegagalan pembangunan acapkali diukur berdasarkan perubahan pada tingkat kemiskinan (Kodobik, 2018).

Adapun wewenang gampong mencakup hak berdasarkan sejarah, kewenangan lokal tingkat gampong, serta tugas yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Dengan posisi dan wewenang gampong, diharapkan pemerintah gampong dapat berkontribusi pada pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Konsep gampong sebagai unit politik kecil dalam pemerintahan merupakan landasan utama dalam strategi pembangunan nasional. Di samping itu, gampong memiliki potensi besar yang dapat berkontribusi positif pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, gampong merupakan wilayah yang didominasi oleh mayoritas penduduknya, dengan sistem pemerintahan yang dipimpin oleh kepala gampong.²

Meningkatkan Kemakmuran dan mengurangi kemiskinan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menuntut pemerintah daerah untuk mempercepat pencapaian kepentingan bersama. Badan Usaha Pegamponan adalah badan hukum yang dibentuk bersama Gampong untuk

² Mario Juan C.S. Hidete, Arie J. Rorong, Novie. R. A. Palar. Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Mawe Kecamatan Tobelo Timur Kabupaten Halmahera Utara. JAP. No. 114. Vol. VIII, 2022. Hlm. 37.

mengurus pengembangan aset, menyediakan berbagai jenis usaha demi kepentingan masyarakat pegunungan, dan mengelola usaha tersebut. Tujuannya adalah melakukan kegiatan ekonomi melalui administrasi bisnis dengan beragam cara, sumber daya, dan mempertimbangkan lingkungan sekitar.³

Upaya terus dilakukan secara bertahap, termasuk peningkatan kapasitas aparat pemerintahan di tingkat gampong dan kelurahan, peningkatan kapasitas kelembagaan, pelatihan masyarakat, pemberdayaan aspek adat dan sosial budaya, peningkatan usaha ekonomi masyarakat, serta optimalisasi sumber daya alam dan penerapan teknologi yang sesuai. Langkah lain melibatkan peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan ekonomi lokal, dengan fokus meningkatkan kegiatan ekonomi produktif dan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat. Tujuan utamanya adalah meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.⁴

Keterbatasan akses dan ketersediaan sarana prasarana di pedesaan, ditambah dengan kualitas pemerintah peduli rakyat yang masih rendah, menjadi hambatan bagi percepatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Pelayanan terkait akses dan fasilitas gampong, seperti jalan, irigasi, listrik, air minum, teknologi informasi, pendidikan, kesehatan, dan pasar, merupakan kendala yang perlu diatasi. Khususnya dalam upaya meningkatkan ekonomi di pedesaan, perlu

³ Rendi Perima Wardhana, peran masyarakat desa dalam mensejahterakan masyarakat Desa Melalui badan milik desa (BUMdes), (Studi Di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang).

⁴ Minardi. Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Dlingo Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul D.I. Yogyakarta. Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2015. Hlm. 5

dilakukan pengembangan sarana prasarana produksi lokal dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayah pedesaan.⁵

Gampong Jruék balee, yang terletak di pemukiman jruék di sepanjang jalan Kecamatan Indrapuri, Masyarakat Gampong jruék balee menekuni beragam profesi, termasuk sebagai petani, pekebun, pedagang, peternak, PNS, dan sebagian lainnya bekerja sebagai kuli bangunan. Secara geografis dan administratif, Gampong Jruék balee merupakan salah satu dari 52 gampong di Kecamatan indrapuri, yang terintegrasi dalam 604 gampong di Kabupaten Aceh Aceh Besar. Gampong Jruék balee, yang memiliki luas wilayah lebih dari 60 Haktar, secara topografis terletak Di Dekat Sawah. Jarak antara Gampong Jruék balee dengan Ibu Kota Kecamatan adalah sekitar 7,3 kilometer, sementara jarak ke Kabupaten mencapai sekitar 38,5 kilometer.⁶

Gampong Jruék Balee merupakan salah satu gampong yang masih mengalami keterbatasan Sumberdaya manusia Sehingga tidak sedikit masyarakat yang miskin di gampong jruék balee maka perlu di terapkan good governance pro kemiskinan agar gampong jruék balee lebih sejahtera. namun di balik dari itu Pemerintah setempat tidak hanya merencanakan program dan kegiatan, tetapi juga berupaya mewujudkannya dalam kenyataan. Meskipun demikian, Gampong Jruék balee berupaya untuk memastikan bahwa program-program yang diimplementasikan memberikan dampak positif dan respons baik dari masyarakat.

⁵ Ibid

⁶ Profil gampong jruék balee, indrapuri Aceh Besar 2023

Contohnya, program peningkatan kualitas SDM, administrasi pemerintahan, dan pembangunan infrastruktur yang telah berhasil dilaksanakan oleh pemerintah gampong, memberikan dampak positif pada masyarakat Gampong Jruiek balee.

Kemudian Secara Data Masyarakat Provinsi bisa kita lihat pertahunnya angka kemiskinan di kutip dari data BPS Provinsi Aceh.

Tabel 1.1 Data Kemiskinan BPS Provinsi Aceh Tahun 2021-2023

Kabupaten/Kota & Provinsi	Persentase Penduduk Miskin (PO) menurut Kabupaten/Kota (Persen)		
	2021	2022	2023
SIMEULUE	18,98	18,37	17,92
ACEH SINGKIL	20,36	19,18	19,15
ACEH SELATAN	13,18	12,43	12,10
ACEH TENGGARA	13,41	12,83	12,45
ACEH TIMUR	14,45	13,91	13,39
ACEH TENGAH	15,26	14,50	14,38
ACEH BARAT	18,81	17,93	17,86
ACEH BESAR	14,05	13,38	13,38
PIDIE	19,59	18,79	18,78
BIREUEN	13,25	12,51	12,12
ACEH UTARA	17,43	16,86	16,64
ACEH BARAT DAYA	16,34	15,44	15,43
GAYO LUES	19,64	18,87	18,82
ACEH TAMIANG	13,34	12,61	12,51
NAGAN RAYA	18,23	17,38	17,25
ACEH JAYA	13,23	12,51	12,42
BENER MERIAH	19,16	18,39	18,31
PIDIE JAYA	19,55	18,45	18,40
BANDA ACEH	7,61	7,13	7,04
SABANG	15,32	14,66	14,59

Kabupaten/Kota & Provinsi	Persentase Penduduk Miskin (P0) menurut Kabupaten/Kota (Persen)		
	2021	2022	2023
LANGSA	10,96	10,62	10,53
LHOKSEUMAWE	11,16	10,84	10,73
SUBULUSSALAM	17,65	16,94	16,41
PROVINSI ACEH	15,33	14,64	14,45
-			
-			

(Sumber : BPS Provinsi Aceh 2023)

Tabel 1.2 Data Kemiskinan BPS Kabupaten Aceh Besar

Tahun 2021-2023

No.	Tahun	Kab. Aceh Besar
1	2020	13,84 %
2	2021	14,05 %
3	2022	13,38 %
4	2023	13,38 %

(Sumber : BPS Aceh Besar 2023)

Sekilas Bisa dilihat Data Kemiskinan Aceh Besar. 13,38% Masyarakat aceh besar bisa kita katakana miskin Maka Sangat perlu partisipasi pemerintah terhadap Masyarakat terkhusus Masyarakat gampong jruék balee yang bermatapencarian rata-rata petani, peternak dan pekebun.

Adapun Kemiskinan merupakan suatu permasalahan pembangunan yang ditandai dengan pengangguran dan keterbelakangan serta keterpurukan. Masyarakat miskin lemah dalam kemampuan berusaha dan mempunyai akses

yang terbatas kepada kegiatan sosial ekonomi. Permasalahan kemiskinan sangat kompleks dan upaya penanggulangannya harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu. Dengan demikian, kemiskinan menjadi salah satu tema utama pembangunan. Keberhasilan dan kegagalan pembangunan acapkali diukur berdasarkan perubahan pada tingkat kemiskinan (Kodobik, 2018).

Berangkat dari penjelasan diatas penulis tertarik mengkaji lebih dalam mengenai penerapan prinsip-prinsip Good Governance oleh Aparatur Gampong Jruék Balee, dan menuangkannya kedalam skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan yang berjudul **“Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pro Kemiskinan Studi kasus Di Gampong Jruék Balee Kabupaten Aceh Besar”**.

Adapun Prinsip-prinsip Good governance yang kita bahas pada skripsi ini hanya mencakup pada tiga aspek yaitu 1) Partisipasi, 2) transparasi Dan 3) efektivitas. Alasan memilih 3 prinsip ini untuk mempermudah peneliti dalam mengkaji data dalam perspektif ruang lingkup kecil.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Partisipasi, transparasi dan efektivitas dalam prinsip Good Governance Pro-Kemiskinan Di Gampong Jruék Balee?

2. Apa Saja kendala dalam pelaksanaan prinsip-prinsip good governance Pro-Kemiskinan Di Gampong Jruék Balee?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa implementasi penerapan prinsip good governance Pro-Kemiskinan Di Gampong Jruék Balee.
2. Untuk Mengidentifikasi Apa Saja kendala dalam pelaksanaan prinsip-prinsip good governance Pro-Kemiskinan Di Gampong Jruék Balee

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori good governance mengenai cara menagatur kebijakan pro rakyat miskin.

2. Manfaat Praktis

a) Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan referensi dan evaluasi terhadap upaya pemerintah dalam Upaya menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good governance) yang selama ini telah dilaksanakan. Ada inovasi baru terkait mewujudkan good governance yakni melalui mempertimbangkan program pemerintahan gampong yang terutama melihat rakyat miskin.

b) Sebagai masukan untuk mengetahui faktor penghambat terkait pelayanan serta kebijakan aparatur desa yang kurang pro Masyarakat miskin di gampong jruek balee.

1.5 Penjelasan Istilah

Penjelasan ini dimaksudkan untuk menguraikan makna atau definisi yang sesuai dengan konteks dan aspek masing-masing kata agar terhindar dari kesalahpahaman. Sehingga terdapat beberapa kalimat yang dipakai dalam penelitian yang akan dikemukakan sebagai berikut :

1.5.1 Good governance

Dalam dua dekade terakhir, istilah “governance” menjadi perbendaharaan yang banyak digunakan dalam diskusi administrasi pembangunan dan demokrasi. Di sektor publik, “governance” telah diadopsi menjadi prinsip-prinsip yang melandasi bekerjanya sebuah sistem yang dianggap akan menjamin efektivitas sebuah pemerintahan. Sebagai prinsip, governance adalah sebuah sistem aturan, proses dan perilaku yang mempengaruhi bagaimana kekuasaan dijalankan pada setiap tingkatan pemerintahan yang berbeda, terutama berkaitan dengan keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas, dan efektivitas. (World Bank, 1992: 1-10; Rhodes, 1996: 652-667; Pierre, 1999: 372-396).⁷

Sebelum melakukan analisis terhadap good governance di tingkat desa, bagian berikut ini mendiskusikan tentang pentingnya good governance dan

⁷ World Bank, 1992. Governance and Development , Washington DC. World Ban

network sebagai sebuah mekanisme baru. Selanjutnya, diskusi akan diarahkan pada perkembangan pengaturan desa sesuai dengan perkembangan politik yang terjadi. Dalam analisis, kajian difokuskan pada desa Wedomartani di wilayah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk menggambarkan bagaimana bekerjanya good governance di tingkat desa.⁸

Sejak tahun 1990-an, perdebatan tentang good governance mulai menghangat. Governance telah menjadi bahasa negosiasi antara donor dan negara-negara berkembang (Larmour, 1998: 1).⁹

Organisasi bantuan internasional, seperti Bank Dunia, telah mengamati adanya masalah governance yang menghambat upaya untuk meningkatkan pembangunan sosial dan ekonomi di banyak negara sedang berkembang. Masalah tersebut menyangkut penyalahgunaan dana publik oleh kelompok elit, dan terabaikannya praktik politik di tingkat lokal oleh lembaga-lembaga donor internasional.

Menurut Hyden, governance lebih menyoal bagaimana sebuah sistem politik beroperasi, dibandingkan hanya sekedar bagaimana aspek distributif dan alokatif dari sebuah kebijakan publik. Selama ini, pengelolaan pembangunan yang menyangkut pembuatan kebijakan publik dan penyediaan pelayanan publik lebih banyak didominasi oleh negara (state centred), serta menyingkirkan peran

⁸ Dinamika Good Governance di Tingkat Desa, (Pramusinto & Latief

⁹ Dwiyanto, A., et al. 2007. Kinerja Tata Pemerintahan Daerah di Indonesia, Yogyakarta, PSKK-UGM.

aktor non-negara. Karena itu, pergeseran pengelolaan risorsis publik dari government ke governancemembawa implikasi penambahan aktor dalam kebijakan publik: public sector (*state sphere*), private sector (*market sphere*) dan voluntary sector (*civil society sphere*) (Koliba, 2006: 593-601).¹⁰

Namun demikian, kompleksitas semakin kelihatan ketika aktor di dalam negara sendiri sebenarnya tidak bersifat tunggal. Ada aktor yang terlibat dalam menyadarkan kepedulian masyarakat terhadap isu-isu publik (*civil society*), pengagendaan kebijakan melalui institusi politik (*political society*), pembuatan kebijakan (*government*), implementasi kebijakan (*bureaucracy*), interaksi pasar dan negara (*economic society*), dan penyelesaian sengketa dan konflik (*judiciary*). Faktor kritikal aktor dalam good governance adalah untuk memonitor dan mengendalikan perilaku kekuasaan yang mengelola risorsis, sebagaimana dijelaskan dalam teori principal-agent model (Provan dan Kenis, 2007: 230, lihat juga World Governance Assessment, 2003: 2-9).¹¹

1.5.2 Pro-Kemiskinan

Kemiskinan merupakan momok bagi pembangunan suatu negara. Selain menghambat pertumbuhan ekonomi, kemiskinan juga dapat menimbulkan masalah multidimensi. Untuk memecahkan masalah kemiskinan, pemerintah

¹⁰ Hyden, G., 1999. The World Governance Survey: Who Should Assess and How? iacconference.org/.../11th_iaac_workshop_THE_WORLD_GOVERNANCE_SURVEYd.oc

¹¹ Provan, K.G., and Kenis, P., 2007. "Modes of Network Governance: Structure, Management, and Effectiveness", *Journal of Public Administration Research and Theory*, Vol.18:229-252

berupaya menggalakkan berbagai macam program pengentasan kemiskinan. Saat ini, Program Pemberdayaan Masyarakat (*Community Driven Development-CDD*).

Telah menjadi salah satu program yang sering dilakukan oleh negara-negara berkembang untuk mengelola tingkat kemiskinan. Konsep dasarnya sangat sederhana, yaitu pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Di Indonesia, pemerintah menerapkan Program CDD melalui Program Nasional.

Pemberdayaan Masyarakat sebagai dasar dari kampanye pengurangan kemiskinan. Dalam pelaksanaannya, program PNPM membutuhkan keikutsertaan masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program. Sebuah studi dari keberhasilan PNPM dilakukan tak lama setelah program ini diluncurkan pada tahun 2007. Hasil studi terbaru menyebutkan bahwa PNPM.¹²

Cenderung dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mampu mengurangi jumlah orang miskin (pertumbuhan pro-kemiskinan). Namun ironisnya, program ini dihentikan oleh rezim baru di awal tahun 2015. Berangkat dari masalah ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari PNPM sebagai cara untuk mencapai pertumbuhan yang pro-kemiskinan (*pro-poor growth*). Cakupan masalah penelitian ini adalah merumuskan peran PNPM

¹² URI: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20422692&lokasi=lokal>

di tingkat nasional mengingat sebagian besar penelitian sebelumnya hanya terfokus pada daerahdaerahtertentu.

Studi ini menghasilkan kesimpulan bahwa PNPM adalah instrumen yang bisa diterapkan untuk mencapai pertumbuhan yang prokemiskinan (pertumbuhan yang menguntungkan orang miskin).yang menyertai pertumbuhan ekonomi, cenderung akan mengurangi kemiskinan.¹³

1.5.3 Program Pro-Kemiskinan

Pemikiran mengenai kemiskinan berubah sejalan dengan berjalannya waktu, tetapi pada dasarnya berkaitan dengan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (*Britha Mikelsen, 2003*). Kemiskinan menunjukkan situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh orang miskin tersebut, melainkan karena tidak bisa dihindari dengan kekuatan yang dimilikinya (*Soegijanto Soegijoko, 1997*).

Strategi memerangi kemiskinan yang dikemukakan oleh Gunnar Adler Karlsson yang dikutip Andre Bayo Ala (1981) meliputi: (1) strategi dalam jangka pendek yaitu memindahkan sumberdaya-sumberdaya kepada kaum miskin dalam jumlah yang memadai. Perbaikan keadaan kemiskinan dalam jangka pendek diantaranya menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperbaiki distribusinya; (2) Strategi jangka panjang dengan menumbuhkan

¹³ Desiwanti Astuti; Papyrakis, Elissaios, supervisor; Anirban Asgupta, examiner (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2015)

swadaya setempat. Perbaikan dalam jangka panjang dengan memperbaiki dan memenuhi harkat hidup secara individual dan sosial yang bermartabat.¹⁴

Strategi Pengentasan Kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dapat dibagi menjadi dua bagian besar, pertama melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara, dan kedua membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Strategi tersebut selanjutnya dituangkan dalam tiga program yang langsung diarahkan pada penduduk miskin yaitu:

- 1) penyediaan kebutuhan pokok;
- 2) pengembangan sistem jaminan sosial; dan
- 3) pengembangan budaya usaha.

Selain itu penduduk miskin mempunyai strategi sendiri untuk menanggulangi kemiskinannya. Strategi yang ditempuh yaitu dengan pinjam dari lembaga informal, menambah jam kerja, anggota keluarga ikut bekerja, merantau atau berhemat.¹⁵

¹⁴ Strategi memerangi kemiskinan yang dikemukakan oleh Gunnar Adler Karlsson yang dikutip Andre Bayo Ala (1981).

¹⁵ <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sulteng/id/data-publikasi/berita-terbaru/2830-memahami-kembali-strategi-pengentasan-kemiskinan-di-indonesia-sebagai-sumber-penerimaan-negara>.

Adapun Strategi pengentasan kemiskinan yang dikemukakan oleh Bank Dunia, bahwa setiap dekade strategi pengentasan kemiskinan mengalami perkembangan mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, pengembangan kesehatan dan pendidikan, perlindungan sampai dengan pemberdayaan kaum miskin.

1.5.4 Penarapan Di Gampong

Diantaranya Pelembagaan BUMG untuk pemberdayaan dan penggerakan potensi ekonomi desa, bertujuan untuk mendukung kebijakan makro pemerintah (UU No.32/2004) dalam upaya pengentasan kemiskinan khususnya di pedesaan. Pemberdayaan BUMG secara melembaga di tingkat desa diharapkan akan mendinamisasi segala potensi desa untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Oleh sebab itu beberapa unsur penting sebagai prasyarat pendirian, pemberdayaan, dan pelembagaan BUMG dijadikan sebagai tujuan khusus yang akan dihasilkan melalui penelitian ini, yaitu:

1. Model kelembagaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa (penjabaran Pasal 213 UU No.32/2004).
2. Model organisasi dan manajemen BUMG.
3. Model fasilitasi yang terdiri dari (a) partisipasi masyarakat dan pemberdayaan ekonomi, (b) pendampingan usaha, dan (c) pola kemitraan

eksternal terhadap lembaga keuangan (bank, koperasi, atau penanam modal), dan mitra usaha lainnya.

Amihardja dan Hikmat (2001) berpendapat bahwa masyarakat Gampong perlu diintervensi melalui pembelajaran pemberdayaan. Model pembelajaran untuk pemberdayaan masyarakat itu meliputi pembelajaran makro dan mikro. Pembelajaran makro terdiri dari komponen-komponen (1) penyadaran, (2) perencanaan, (3) pengorganisasian, (4) penggerakan, (5) penilaian, dan (6) pengembangan. Sedangkan pembelajaran mikro yang menghusus pada pelatihan keterampilan diimplementasikan dalam bentuk (1) keterampilan produktif, (2) keterampilan pemasaran, dan (3) keterampilan pengelolaan keuangan Aplikasi manajemen pemberdayaan masyarakat Gampong.